

Opini

Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke redaksi melalui email: opini.tribun.jateng@gmail.com, belum pernah dipublikasi di media lain. Artikel hendaknya diketik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, disertai copy (scan) identitas, nomor telepon dan foto. Setiap artikel yang telah dimuat di harian Tribun Jateng dapat dialihwujudkan dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian Tribun Jateng.

Kilas Balik HUT Sukoharjo

DALAM peta wilayah Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo menempati posisi penting sebagai penyangga ketahanan pangan (beras). Beberapa hari lalu, kabupaten ini memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73. Digelar acara tirakatan dan dedongongan yang diikuti ratusan pejabat dan bupati. Selama ini, tak banyak yang memahami episode sejarah kelahiran Sukoharjo yang memiliki kelir berbeda dengan beberapa kabupaten di Soloraya. Boleh dikatakan, Sukoharjo merupakan sebuah "keunikan" sejarah dari sisi pandang pemerintahan.

Tatkala penjajah Jepang menancapkan kuku kekuasaan di Hindia Belanda sampai Agustus 1945, tiada seorangpun yang kenal akan nama: "Kabupaten Sukoharjo". Bersama Kabupaten Sragen, Klaten, Boyolali dan Surakarta, ia berada kekuasaan Solo-ko yang diciptakan pemerintah pendudukan yang mengaku "saudara tua" itu. Hanya saja, Sukoharjo masih berupa kawedanan di bawah "asuhan" Kabupaten Kota Surakarta.

Dua hari selepas gendang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ditabuh, Presiden Soekarno menelurkan Piagam Penetapan Presiden RI tanggal 19 Agustus 1945, yang menyatakan Surakarta sebagai daerah Swapraja. Namun, takdir sejarah sukar ditebak dan ceritanya tak selalu manis. Surakarta diguncang revolusi sosial yang dipelopori kelompok Kiri. Pada 15 Juli 1946 dikeluarkan Penetapan Presiden (PP) nomor 16/SD/1946 berisi pembekuan DIS serta membentuk pemerintahan daerah yang berhak mengatur wilayah bekas swapraja. Kawasan Surakarta langsung dikendalikan Propinsi Jawa Tengah.

Gejolak pada tataran paling bawah juga sulit diredam. Suyatno Kartodirdjo dalam tulisannya bertitel *Masyarakat Daerah dalam Revolusi Indonesia* yang diumumkan pada majalah *Prisma* (1984) menerangkan bahwa di pedesaan Soloraya timbul aksi daulat yang dilancarkan masyarakat terhadap barisan kepala desa warisan pemerintahan kerajaan. Segala yang beraroma feodal kudu dibasmi. Segenap kepala desa yang baru dipilih rakyat digelar sebutan "lurah kemerdekaan" atau "lurah perjuangan". Upaya tersebut dapat dipandang sebagai proses defeodalisasi dari struktur masyarakat feodal.

Dalam tubuh Komite Nasional Indonesia (KNI) kabupaten kota dan luar kota terjadi perdebatan sengit. Semenjak Kota Surakarta berdiri pertengahan 1946 itu, Kabupaten Kota Surakarta menyusut menjadi kecil lantaran daerahnya dikurangi satu kawedanan (setingkat kecamatan). Kawedanan ini disalin namanya menjadi level Kabupaten Sukoharjo. Muncul perdebatan keras dalam forum ketika membahas pemilihan lokasi ibukota Kabupaten Sukoharjo. Sebagian anggota menghendaki Kartasura sebagai ibukota. Alasan kuat disorongan bahwa Kota Kartasura lebih maju beberapa langkah serta komplit infrastrukturnya ketimbang Sukoharjo. Ditinjau dari aspek aksesibilitas, Kartasura berada di titik simpang antara Solo-Yogyakarta dan Solo-Semarang yang telah

tercipta sedari periode Kerajaan Kartasura. Ditambah pula Kartasura memiliki penerangan listrik dan tersedia *waterleiding* (cikal bakal PDAM), sedangkan Sukoharjo masih berwujud desa belaka.

Sisa anggota rupanya berpendapat lain. Sukoharjo dipilih sebagai ibukota menimbang letaknya ditengah wilayah kabupaten. Secara ekonomi, justru bakal menyulap Sukoharjo yang semula berwujud desa menjadi kota kabupaten se-hinggasetara dengan kota lainnya. Dalam forum itu dibahas pula kahanan tanah. Daerah ini diiris menjadi dua oleh Bengawan Solo. Di sisi barat sungai lawas itu, tanahnya loh jinawi, meliputi Kawedanan Kartasura. *Setaun utuh* anekatanaman kelihatan angigitusubur, ditunjang pengairannya yang relatif baik. Yang menjadi catatan, luasan tanah yang acumaseperempat dari seluruh daerah Kabupaten Sukoharjo.

Sedangkan belahan timur Bengawan Solo, seperti Kecamatan Mojolan lumayan subur, tidak kalah dengan kawasan yang diuraikan di muka. Hanya saja, kondisi tanah di Kecamatan Polokarto dan Bendosarikurang mengembirakan. Terlebih lagi didominasi tanah liat merah yang akrab dengan ketela pohung dan cantel. Setahun sekali padi ditanam, dan hasilnya tidak terlalu memuaskan. Logis jika area ini dipandang daerah minus, sering dilanda kelaparan (*hongeroedeem*).

Disinggung perkara kependu-

dukan bahwa perumahan masih jauh kualitasnya. Dinas kesehatan membutuhkan perhatian luar biasa guna mencegah timbulnya epidemik yang acap mengoyak masyarakat. Satu aspek yang lumayan bikin tersenyum ialah hampir seluruh penduduk di kawasan ini dapat menulis dan membaca. Saya temukan selebar foto hitam putih permulaan 1950an, berdiri gedung taman bacaan rakyat di Sukoharjo dikerumuni warga. Artinya, sudah tersemaikan kesadaran literasi di kabupaten baru itu. Jumlah sekolah dua kali lipat dibandingkan sebelum *clash* kedua, walau kondisi gedungnya memprihatinkan.

Dari seluruh gambaran itu, rombongan panitia pemilihan ibukota Kabupaten Sukoharjo mafhum perlu diciptakan pemerataan ekonomi dan membangun kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, meski menyadari ikhtiar itu tidaklah enteng seperti membalikkan telapak tangan dan belum beres dalam rentang satu dasawarsa. Sebagai kabupaten termuda, mereka berharap tidak ingin menjebarkan ketimpangan sosial-ekonomi yang telah ada.

Spirit nasionalisme dan nuansa kebebasan (lepas dari bayang-bayang keraton) membuat kepala mereka tegak. Lebih percaya diri mengatur wilayah dan menyongsong masa depan yang sudah terencana. Demikianlah, makna dari kilas balik HUT Kabupaten Sukoharjo. Perlu kiranya menarik busur waktu ke belakang untuk mendaur ulang semangat para pendahulu memakmurkan kawasan sehingga tidak berhenti pada slogan semata: Kota Makmur. (*)



HERI PRIYATMOKO
DOSEN SEJARAH, UNIVERSITAS SANATA
DHARMA, MANTAN KETUA KARANG TARUNA
TELUKAN, SUKOHARJO